

PENGARUH KARAKTERISTIK KOMITE AUDIT TERHADAP PENGUNGKAPAN ETIKA SUKARELA

Sindy Lolita Sinaga, Herry Laksito¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof Soedarto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

The aim of this study is to examine the influence of audit committee characteristics on voluntary ethics disclosure. The independent used in this study are expertise of audit committee members, frequency of meeting of audit committee, audit committee size, audit committee tenure and multiple directorships of audit committee members while the dependent variable used in this study is voluntary ethics disclosure. The population in this study consists of all companies listed on the Indonesian Stock Exchange in 2018. Sample of this study is obtained by using purposive sampling method and there are 90 samples that fulfill the criteria. This study uses a multiple regression analysis. The results of this study indicate that only two audit committee characteristics that is frequency of meeting and multiple directorship were significantly related with the voluntary ethics disclosure, while expertise, size and tenure were not significantly related with the voluntary ethics disclosure.

Keywords: Expertise, frequency of meeting, size, tenure, multiple directorships, audit committee, voluntary ethics disclosure.

PENDAHULUAN

Etika adalah standar atau moral yang berkaitan dengan sesuatu yang benar dan salah serta apa yang baik dan buruk (Wulandari, 2015). Dalam konsep etika bisnis ada pemahaman mengenai etika usaha serta etika kerja dan perorangan. Etika usaha atau etika bisnis berkaitan dengan hubungan sebagai satu kesatuan antara perusahaan dan karyawan dengan lingkungannya, umpamanya dengan masyarakat sekitar. Etika kerja dan perorangan berkaitan dengan hubungan antara perusahaan dengan karyawannya serta berkaitan dengan tata tertib yang mengatur hubungan antar karyawan (Wulandari, 2015).

Etika merupakan aspek utama dalam melaksanakan bisnis supaya sesuai dengan dan berada dalam batasan hukum seperti yang telah ditentukan oleh peraturan dan kode yang diakui. Enron, WorldCom dan Parmalat merupakan perusahaan-perusahaan terkemuka yang menjadi teladan, namun kegagalan perusahaan-perusahaan tersebut memperlihatkan konsekuensi ekstrem yang mengancam perusahaan yang memilih untuk menggunakan cara tidak etis dalam melakukan bisnis (Muhammad, Shahimi, Yahya dan Mahzan, 2009). Kode etik sangat penting untuk membantu mengarahkan bisnis supaya terhindar dari perjanjian yang bertentangan dengan aturan yang berlaku dan terhindar dari perbuatan curang.

Pengungkapan etika adalah pengungkapan sukarela yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tertentu untuk meningkatkan tata kelola perusahaan mereka (Sullivan dan Shkolnikov, 2006). Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan yang melebihi persyaratan pengungkapan yang diamanatkan disebut sebagai pengungkapan sukarela (Qu, Cooper, Wise dan Leung, 2012).

Komite audit adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap etika dan merupakan suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang berfungsi untuk memastikan perusahaan menerapkan praktik-praktik etis. Komite audit membantu dalam meningkatkan pengungkapan etika di perusahaan dan secara efektif mengamati manajemen. Penelitian ini fokus kepada komite audit karena kebanyakan perusahaan telah memberikan tugas untuk mengawasi etika ke komite ini. Oleh karena itu, sudah menjadi sesuatu yang wajib bagi Dewan Direksi, pembuat kebijakan dan investor untuk memberi perhatian lebih besar pada karakteristik komite audit dalam menentukan pengungkapan etika perusahaan.

¹ Corresponding author

Penelitian oleh Akhtaruddin et al. (2009) telah menentukan hubungan antara proporsi anggota komite audit dengan jumlah anggota di dewan dan tingkat pengungkapan sukarela dan hasilnya tidak mendukung bahwa komite audit memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan sukarela. Secara khusus, diperlukan karakteristik komite audit seperti independensi komite audit, ukuran, frekuensi rapat dan keahlian untuk memastikan efektivitas komite audit. Oleh sebab itu, penelitian ini berusaha untuk menguji apakah karakteristik komite audit mempunyai pengaruh positif atau negatif terhadap pengungkapan etika..

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori agensi menjelaskan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dan agen terjadi dikarenakan tiap-tiap pihak hanya termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri. Konflik agensi timbul karena kepemilikan dan pengendalian perusahaan terpisah (Jensen dan Meckling, 1976). Untuk mengatasi konflik agensi tersebut, keberadaan komite audit penting dalam memoderasi perilaku tim manajemen yakni dalam menentukan suatu alternatif atau keputusan yang memaksimalkan kepentingan pribadi mereka dari kepentingan perusahaan. Apabila komite audit efektif dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, maka akan semakin kecil kemungkinan manajemen melakukan perilaku tidak etis atau melanggar peraturan dan kesepakatan yang ada, sehingga dapat memicu manajemen untuk melakukan pengungkapan sukarela yang menurut pertimbangannya merupakan *good news* yang dapat menarik perhatian investor dan untuk mengurangi konflik agensi karena berkurangnya asimetri informasi antara manajemen sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal.

Keahlian Anggota Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengharuskan anggota komite audit paling tidak terdiri dari 1 anggota yang memiliki pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan. McMullen dan Raghunathan (1996) menjelaskan dalam penelitian mereka bahwa perusahaan yang memiliki anggota komite audit dengan keahlian keuangan sedikit kemungkinannya mengalami masalah keuangan. Persons (2005) mengatakan bahwa terjadinya kecurangan tidak ada kaitannya dengan keahlian komite audit. Menurut Defond, Hann dan Hu (2005), apabila anggota komite audit mempunyai keahlian keuangan dalam melaksanakan tugasnya, perusahaan akan meningkatkan tata kelola mereka.

Persons (2009) menyebutkan bahwa untuk mempertahankan reputasinya, anggota independen dari komite audit dengan keahlian keuangan atau akuntansi lebih besar kemungkinannya untuk mendeteksi salah saji keuangan atau transaksi bisnis yang tidak wajar karena mereka harus mematuhi kode etik profesional mereka. Oleh sebab itu, penelitian ini menyatakan bahwa komite audit dengan keahlian keuangan harus lebih efektif karena akan memantau perusahaan. Komite audit dengan keahlian keuangan juga akan melaksanakan tugas mereka secara etis dan akan mengarah pada pengungkapan etika. Hipotesis pertama dirumuskan:

H1: Keahlian anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika sukarela

Frekuensi Rapat Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Raghunandan et al. (2001) menyoroti bahwa dalam melaksanakan tugasnya, sebuah komite audit yang lebih sering bertemu lebih besar kemungkinannya mempunyai informasi yang cukup, lebih rajin dan berpengetahuan luas tentang masalah akuntansi dan audit saat ini. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit wajib melakukan rapat secara berkala yaitu minimal 4 kali dalam setahun. Demikian pula dengan Abbott et al. (2003; 2004) yang menyatakan bahwa kecil kemungkinan dilakukannya penyajian kembali laporan keuangan apabila sebuah komite audit melaksanakan pertemuan atau rapat paling tidak 4 kali dalam setahun.

Persons (2009) menemukan bahwa perusahaan akan lebih sering melakukan pengungkapan sukarela ketika komite audit lebih sering melakukan pertemuan. Berdasarkan Persons (2009), penelitian ini mengharapkan bahwa komite audit akan lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dan mengarah pada pengungkapan etika ketika komite audit tersebut lebih sering melakukan rapat. Hipotesis kedua dirumuskan:

H2: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika sukarela

Ukuran Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 mengharuskan bahwa komite audit paling sedikit terdiri dari 3 orang anggota yang asalnya dari komisaris independen serta pihak eksternal perusahaan. Penelitian sebelumnya memperlihatkan bahwa semakin besar ukuran sebuah komite audit akan mengarahkan pada perdebatan tidak penting dan penundaan dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang buruk serta proses pengambilan keputusan yang buruk (Lin, Xiao dan Tang, 2008; Hackman, 1990; Steiner, 1972).

Meskipun demikian, ada sebuah argumen yang mengatakan bahwa sebuah komite audit yang lebih besar akan kondusif dan mengarahkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan etika karena ada kemungkinan yang lebih besar bahwa komite audit akan melibatkan anggota yang sangat etis yang dapat memengaruhi pengungkapan etika (Persons, 2009). Penelitian sebelumnya (Dalton, Daily, Johnson dan Ellstrand, 1999) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran dan fungsi pengawasan dewan yang menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Menurut Yang dan Krishnan (2005), terdapat hubungan negatif antara ukuran komite audit dan manajemen laba. Oleh sebab itu, penelitian ini mengharapkan bahwa komite audit akan lebih efektif dalam memantau perusahaan dan mengarah pada pengungkapan etika ketika ukuran komite audit tersebut lebih besar. Hipotesis ketiga dirumuskan:

H3: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika sukarela

Masa Jabatan Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Masa jabatan anggota komite audit tidak boleh lebih panjang jangka waktunya dari masa jabatan dewan komisaris. Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, masa jabatan dewan komisaris yaitu sampai penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 periode masa jabatan atau maksimal 5 tahun. Semakin lama masa jabatan anggota komite audit akan menuntun kepada kinerja, efektivitas, pengawasan dan pengalaman yang lebih tinggi dalam menjalankan operasi perusahaan (Bedard et al., 2004; Thoopsamut dan Jiakengkit, 2009).

Persons (2005) menguji tentang masa jabatan komite audit di mana kemungkinan terjadinya kecurangan lebih rendah ketika anggota komite audit mempunyai masa jabatan yang lebih lama. Yang dan Krishnan (2005) dan Liu dan Sun (2010) menemukan bahwa terdapat hubungan negatif antara masa jabatan rata-rata dari anggota komite audit terhadap manajemen laba. Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa komite audit akan lebih efektif dalam memantau perusahaan dan mengarah pada pengungkapan etika ketika anggota komite audit tersebut mempunyai masa jabatan yang lebih lama. Hipotesis keempat dirumuskan:

H4: Masa jabatan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika sukarela

Multiple Directorships Anggota Komite Audit Berpengaruh Negatif terhadap Pengungkapan Etika Sukarela

Keanggotaan pengurus yang bertugas di banyak dewan digambarkan sebagai *directorships*. *Multiple directorships* memerlukan lebih banyak waktu dan usaha untuk secara efektif mengawasi manajemen (Persons, 2005; Morck, Shleifer dan Vishny, 1988). Shivdasani dan Yermack (1999) mengungkapkan bahwa pengurus dengan *multiple directorships* efektif dalam mengawasi manajemen. Core et al. (1999), Fich dan Shivdasani (2006) dan Liu dan Sun (2010) mendapati bahwa pengurus yang memegang terlalu banyak jabatan tidak mempunyai waktu yang cukup dan terlalu sibuk untuk mengawasi manajemen sehingga hal ini menyebabkan rendahnya efektivitas dalam pengawasan. Core, Holthausen dan Larcker (1999) mengungkapkan bahwa pengurus dengan *multiple directorships* tidak mempunyai pemeriksaan manajemen yang memadai. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini dinyatakan bahwa komite audit akan semakin kurang efektif dalam mengawasi perusahaan dan sedikit kemungkinan akan mengarah pada pengungkapan etika ketika jabatan (*directorship*) yang dipegang anggota komite audit tersebut semakin banyak. Hipotesis kelima dirumuskan:

H5: *Multiple directorships* anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan etika sukarela

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu pengungkapan etika sukarela. Penelitian ini memakai metode analisis isi (*content analysis*) terhadap 18 aspek pengungkapan etika untuk menentukan indeks pengungkapan. Delapan belas aspek pengungkapan etika yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari Persons (2009) yang menyatakan bahwa aspek-aspek ini merupakan aspek umum pada pengungkapan etika yang diungkapkan dalam laporan tahunan oleh perusahaan publik di Amerika Serikat. Pengukuran yang dipilih untuk perusahaan yang melakukan pengungkapan etika sukarela yaitu dengan memberi label “1” dan jika perusahaan tidak melakukan pengungkapan etika maka diberi label “0”.

Delapan belas aspek pengungkapan etika yang diadopsi dari Persons (2009) adalah sebagai berikut:

1. Apakah perusahaan mempunyai kode perilaku dan etika bisnis tertulis?
2. Apakah perusahaan mempunyai komite khusus dari dewan komisaris (*BOCs*) yang memiliki tanggung jawab pengawasan terkait dengan etika?
3. Apakah perusahaan mempunyai etika perusahaan atau petugas kepatuhan?
4. Apakah perusahaan memperhitungkan etika dalam mempekerjakan seorang direktur atau seorang eksekutif?
5. Apakah perusahaan menyangkutpautkan kompensasi eksekutif dengan perilaku etis perusahaan?
6. Apakah perusahaan menyediakan pelatihan etika bagi karyawan atau mengharuskan karyawan untuk menandatangani surat yang membenarkan bahwa karyawan telah membaca dan akan mematuhi kode etiknya?
7. Berapa banyak dari 12 bagian berikut yang berlaku kode etiknya?
 - a. Pemeliharaan dari catatan perusahaan yang akurat.
 - b. Komunikasi dengan publik.
 - c. Benturan kepentingan antara hubungan pribadi dan profesional.
 - d. Perlakuan informasi rahasia.
 - e. Penggunaan aset perusahaan.
 - f. Anti-nepotisme
 - g. Pelaporan atas pengaduan akuntansi dan perilaku ilegal atau tidak etis.
 - h. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku termasuk diskriminasi, pelecehan, lingkungan dan hak asasi manusia.
 - i. Penyuapan komersial.
 - j. Persaingan dan *fair dealing*.
 - k. Perdagangan orang dalam (*insider trading*) atas saham perusahaan.
 - l. Tindakan disipliner atas pelanggaran kode etik.

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi karakteristik komite audit; keahlian anggota komite audit, frekuensi rapat komite audit, ukuran komite audit, masa jabatan komite audit dan *multiple directorships* anggota komite audit. Variabel keahlian anggota komite audit diukur menggunakan presentase anggota komite audit independen yang mempunyai keahlian akuntansi dan keuangan. Variabel frekuensi rapat komite audit diukur berdasarkan jumlah keseluruhan rapat atau pertemuan yang diadakan komite audit dalam setahun. Variabel ukuran komite audit diukur berdasarkan jumlah keseluruhan anggota komite audit. Variabel masa jabatan komite audit diukur berdasarkan rata-rata masa jabatan anggota komite audit independen. Variabel *multiple directorships* anggota komite audit diukur berdasar pada rata-rata jumlah *multiple directorships* anggota komite audit independen.

Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini ialah berbagai perusahaan yang tercatat dalam BEI pada tahun 2018. Untuk memilih sampelnya, digunakan teknik *purposive sampling* yakni penentuan sampelnya yang mencukupi persyaratan yang peneliti tentukan. Berikut ini adalah kriteria yang ditetapkan untuk memilih sampel:

1. Perusahaan yang termasuk dalam Indeks KOMPAS100 yang diterbitkan pada bulan Juli 2019
2. Perusahaan yang mengeluarkan laporan tahunan pada tahun 2018
3. Perusahaan yang memiliki data lengkap yang diperlukan untuk penelitian

Perusahaan yang termasuk dalam Indeks KOMPAS100 merupakan perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik dan kapitalisasi pasar yang besar, penggunaan sampel penelitian ini digunakan bertujuan untuk melihat apakah perusahaan-perusahaan tersebut melakukan pengungkapan etika sukarela atau tidak.

Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti, sampel penelitian yang diperoleh berjumlah 90 perusahaan.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda dengan menggunakan software SPSS. Model regresi yang dipakai untuk menguji hipotesis yaitu:

$$ETHICS\ DISCLOSURE = \beta_0 + \beta_2AUDACC + \beta_3AUDMET + \beta_4AUDSIZE + \beta_5AUDTEN + \beta_6DIRSHIP + \varepsilon$$

Keterangan:

AUDACC	= Keahlian Anggota Komite Audit
AUDMET	= Frekuensi Rapat Komite Audit
AUDSIZE	= Ukuran Komite Audit
AUDTEN	= Masa Jabatan Komite Audit
DIRSHIP	= <i>Multiple Directorships</i> Anggota Komite Audit
ε	= Kesalahan Residual (Error)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Sampel Penelitian

Deskripsi atas perolehan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1

Deskripsi Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan yang termasuk dalam Indeks KOMPAS100 yang diterbitkan pada bulan Juli 2019	100
2.	Perusahaan yang tidak mempunyai data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian	(6)
3.	Data outlier	(4)
	Total Sampel Penelitian	90

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh total sampel penelitian adalah 90 perusahaan. Dengan rincian, 100 perusahaan yang termasuk dalam Indeks KOMPAS100 yang diterbitkan pada bulan Juli 2019, dikurangi 6 perusahaan yang tidak memiliki data lengkap yang diperlukan dalam penelitian dan dikurangi 4 perusahaan yang di outlier.

Deskripsi Variabel

Statistik deskriptif masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2

Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ED	90	0	16	12,21	3,350
AUDACC	90	0,20	1,00	0,5331	0,22021
AUDMET	90	4	38	9,84	7,567
AUDSIZE	90	3	6	3,41	0,792
AUDTEN	90	1,00	5,00	3,6711	1,19191
DIRSHIP	90	0,00	5,00	0,6535	0,85284

Sumber: Output SPSS, 2020

Keterangan: ED = pengungkapan etika sukarela; AUDACC = keahlian anggota komite audit; AUDMET = frekuensi rapat komite audit; AUDSIZE = ukuran komite audit; AUDTEN = masa jabatan komite audit; DIRSHIP = *multiple directorships* anggota komite audit.

Variabel ED yaitu pengungkapan etika sukarela dengan nilai minimumnya 0 dan maksimum 16. Nilai *mean* adalah 12,21 dengan deviasi standar sebesar 3,350. Variabel AUDACC yaitu keahlian anggota komite audit dengan nilai minimumnya 0,20 dan maksimum 1,00. Nilai *mean* adalah 0,5331 dengan deviasi standar sebesar 0,22021. Variabel AUDMET yaitu frekuensi rapat komite audit dengan nilai minimumnya 4 dan maksimum 38. Nilai *mean* adalah 9,84 dengan deviasi standar sebesar 7,567. Variabel AUDSIZE yaitu ukuran komite audit dengan nilai minimumnya 3 dan maksimum 6. Nilai *mean* adalah 3,41 dengan deviasi standar sebesar 0,792. Variabel AUDTEN yaitu masa jabatan komite audit dengan nilai minimumnya 1,00 dan maksimum 5,00. Nilai *mean* adalah 3,6711 dengan deviasi standar sebesar 1,19191. Variabel DIRSHIP yaitu *multiple directorships* anggota komite audit dengan nilai minimumnya 0,00 dan maksimum 5,00. Nilai *mean* adalah 0,6535 dengan deviasi standar sebesar 0,85284.

Pembahasan Hasil Penelitian

Hipotesis penelitian ini diuji dengan menggunakan uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda merupakan pengujian untuk mengukur adanya hubungan antara dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5%. Tabel berikut menunjukkan hasil uji hipotesis.

Tabel 3
Uji Hipotesis

Variabel	Unstandardized Coefficients		Sig.
	B	Std. Error	
(Constant)	14,808	1,729	0,000
AUDACC	-1,308	1,546	0,400
AUDMET	0,114	0,049	0,024
AUDSIZE	1,210	0,892	0,178
AUDTEN	-0,290	0,286	0,314
DIRSHIP	-1,715	0,728	0,021

Sumber: Output SPSS, 2020

Hipotesis pertama yaitu keahlian anggota komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika sukarela ditolak. Tabel 3 memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,400 dengan nilai koefisien beta sebesar -1,308 yang menandakan arah negatif. Hasil penelitian ini sesuai dengan data yang diperoleh. Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata keahlian anggota komite audit adalah 53%. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. (SMBR) dengan keahlian anggota komite audit sebesar 33% memiliki nilai pengungkapan etika sebesar 16. Sedangkan, PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (IMAS) dengan keahlian anggota komite audit sebesar 67% memiliki nilai pengungkapan etika sebesar 10. Hal ini menunjukkan bahwa keahlian anggota komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Persons (2009) yang tidak mendapati adanya hubungan positif yang signifikan antara keahlian anggota komite audit terhadap pengungkapan etika sukarela. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Othman et al. (2014) yang tidak menemukan hubungan positif yang signifikan antara keahlian anggota komite audit terhadap pengungkapan etika sukarela. Dapat disimpulkan bahwa adanya anggota komite audit yang memiliki keahlian akuntansi atau keuangan tidak terlalu menjadi faktor yang menentukan perusahaan akan melakukan pengungkapan etika sukarela.

Hipotesis kedua yaitu frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika sukarela diterima. Tabel 3 memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,024

dengan nilai koefisien beta sebesar 0,114 yang menandakan arah positif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Persons (2009) yang menemukan hubungan positif dan signifikan antara frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan etika sukarela. Dapat disimpulkan bahwa komite audit yang lebih sering melakukan rapat akan mengarahkan perusahaan pada pengungkapan etika sukarela karena komite audit lebih terinformasi dengan baik dan mengetahui masalah yang ada dalam perusahaan, sehingga lebih fokus dalam melakukan pengawasan yang akan mengarahkan pada pengungkapan etika sukarela.

Hipotesis ketiga yaitu ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika sukarela ditolak. Tabel 3 memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,178 dengan nilai koefisien beta sebesar 1,210 yang menandakan arah positif. Hasil penelitian ini sesuai dengan data yang diperoleh. Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata ukuran komite audit adalah 3,41. PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) dengan ukuran komite audit sebesar 3 memiliki nilai pengungkapan etika sebesar 10. PT XL Axiata Tbk. (EXCL) dengan ukuran komite audit sebesar 4 memiliki nilai pengungkapan etika sebesar 12. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) dengan ukuran komite audit sebesar 5 memiliki nilai pengungkapan etika sebesar 14. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) dengan ukuran komite audit sebesar 6 memiliki nilai pengungkapan etika sebesar 15. Hal ini memperlihatkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh Lin, Xiao dan Tang (2008), Steiner (1972) dan Hackman (1990) yang memperlihatkan bahwa semakin besar ukuran sebuah komite audit akan mengarahkan pada perdebatan tidak penting dan memperlambat proses pengambilan keputusan, komunikasi yang buruk serta proses pengambilan keputusan yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran komite audit yang besar ataupun kecil tidak menjamin perusahaan melakukan pengungkapan etika. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian Othman et al. (2014) yang tidak menemukan hubungan yang signifikan antara ukuran komite audit terhadap pengungkapan etika sukarela. Pengungkapan seperti itu mungkin terikat pada keputusan dan pengaruh dari dewan direksi apakah perlu dilakukan atau tidak. Dapat disimpulkan bahwa ukuran komite audit tidak terlalu menjadi faktor yang menentukan perusahaan akan melakukan pengungkapan etika sukarela.

Hipotesis keempat yaitu masa jabatan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan etika sukarela ditolak. Tabel 3 memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,314 dengan nilai koefisien beta sebesar -0,290 yang menandakan arah negatif. Hasil penelitian ini relevan dengan data yang di peroleh. Dari hasil penelitian diperoleh rata-rata masa jabatan komite audit adalah 3,67. PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) dengan masa jabatan komite audit sebesar 1,00 memiliki nilai pengungkapan etika sebesar 14. Sedangkan, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) dengan masa jabatan komite audit sebesar 5,00 memiliki nilai pengungkapan etika sebesar 7. Hal ini menunjukkan bahwa masa jabatan komite audit berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela. Hasil ini relevan dengan hasil penelitian Persons (2009) yang tidak menemukan hubungan positif yang signifikan antara masa jabatan komite audit terhadap pengungkapan etika sukarela. Dapat disimpulkan bahwa masa jabatan komite audit tidak terlalu menjadi faktor yang memengaruhi perusahaan dalam melakukan pengungkapan etika sukarela.

Hipotesis kelima yaitu *multiple directorships* anggota komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan etika sukarela diterima. Tabel 3 memperlihatkan nilai signifikansi sebesar 0,021 dengan nilai koefisien beta sebesar -1,715 yang menandakan arah negatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa *multiple directorships* anggota komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Othman et al. (2014) yang menemukan adanya hubungan negatif yang signifikan antara *multiple directorships* anggota komite audit terhadap pengungkapan etika sukarela. Anggota komite audit yang memegang terlalu banyak jabatan di perusahaan lain akan memberikan pengaruh negatif terhadap efektivitas dan efisiensi mereka dalam mengawasi manajemen. Dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jabatan di perusahaan lain yang dimiliki oleh anggota komite audit maka semakin sedikit terjadinya pengungkapan etika sukarela karena anggota komite audit tersebut tidak akan mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan di perusahaan yang bersangkutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan guna menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan etika sukarela. Dari hasil pengujian terbukti bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela, *multiple directorships* anggota komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela sedangkan keahlian anggota komite audit, ukuran komite audit dan masa jabatan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan etika sukarela.

Keterbatasan penelitian ini adalah penelitian ini hanya memiliki nilai *adjusted R²* sebesar 0,091 atau 9,1% dan sisanya 90,9% dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mencari faktor atau variabel lain yang mungkin dapat memengaruhi pengungkapan etika sukarela.

REFERENSI

- Abbott, L. J. & Parker, S. (2000). Audit committee characteristics and auditor selection. *Auditing: A Journal of Practice & Theory* 19 (Fall), 47-66.
- Abbott, L. J., Parker, S., Peters, G. F. and Raghunandan, K. (2003). The association between audit committee characteristics and audit fees. *Auditing: A Journal of Practice and Theory*, 22, 17-32.
- Akhtaruddin, M., Hossain, M. A., Hossain, M. and Yao, L. (2009). Corporate governance and voluntary disclosure in corporate annual reports of Malaysian Listed Firms. *Journal Application Management Accounting*, 7 (1), 1-20.
- Akhtaruddin, M. & Haron, H. (2010). Board ownership, audit committees' effectiveness and corporate voluntary disclosures. *Asian Review of Accounting*, 18 (1), 68-82.
- Barry, C. B. & Brown, S. J. (1985). Differential information and security market equilibrium. *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 20, 407-422.
- Bealing, W. E., Jr., and Baker, R. L. (2006). The Sarbanes–Oxley Act: Have we seen it all before? *The Journal of Business and Economic Studies*, 12(2), 1-12.
- Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R. and Lapides, P. D. (2000). Fraudulent financial reporting: Consideration of industry traits and corporate governance mechanisms. *Accounting Horizons*, 14, 14-21.
- Braswell, M.K., Foster, C. M. & Poe, S. L. (2009). A new generation of corporate codes of ethics. *Southern business review*, 1-10.
- Carcello, J. V. and Neal, T. L. (2003). Audit committee characteristics and auditor dismissals following new going-concern reports. *The Accounting Review* 78, 95-118.
- Cleeck, M. A. and Leonard, S. L. (1998). Can corporate codes of ethics influence behavior? *Journal of Business Ethics*, 17, 619-630.
- Core, J., Holthausen, R., and Larcker, D. (1999). Corporate governance, chief executive officer compensation, and firm performance. *Journal of Financial Economics*, 51, 371-406.
- Dalton, D.R., Daily, C.M., Johnson, J.L. & Ellstrand, A.E. (1999). Number of directors and financial performance: A meta-analysis. *Academy of Management Journal*, 42, 674-86.
- Defond, M. L., Hann, R. N. & Hu, X. (2005). Does the market value financial expertise on audit committees of boards of directors? *Journal of Accounting Research* 43 (2), 153-193.
- Diamond, D.W. and R.E. Verrecchia (1991). Disclosure, liquidity, and the cost of capital. *The Journal of Finance*, 46 (September), 1325-1360.
- Eng, L. L., and Mak, Y. T. (2003). Corporate governance and voluntary disclosure. *Journal of Accounting and Public Policy*, 22(4), 325-345.
- Fich, E. M. and Shivdasani, A. (2006). Are busy boards effective monitors? *Journal of Finance* 61, 689-724.

- Fishman, M. J., and Hagerty, K. M. (1989). Disclosure decision by firms and the competition for price efficiency. *The Journal of Finance* (July), 633-646.
- Fitriana N. L. dan Andri P. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela dalam Annual Report. *Diponegoro Journal of Accounting*, 3 No. 3: 1.
- Forker, J. J. (1992). Corporate governance and disclosure quality. *Accounting and Business Research*, 22, 111-124.
- Friedman, T. L. (2008). The great unraveling. *New York Times* OP-ED Columnist, December 16.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hackman, J. R. (1990) *Groups that Work*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Hayek, C. and Hayek, M. (2012). Audit Committee characteristics and moral awareness of financial fraudulent reporting: The moderating role of dispositional integrity.
- Hussain Alkdai, H. K. (2012). Audit committee characteristics and earnings management Malaysian Shariah-compliant companies. *Business and Management Review*, 2(2), 52-61.
- Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). The Theory of the Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*, 3: 305-360.
- Leone, M. (2010). *Ethics and the bottom line*. Diakses pada 15 November 2019 melalui <https://www.cfo.com/risk-compliance/2010/06/ethics-and-the-bottom-line/>.
- Lin, Z. J., Xiao, J. Z. and Tang, Q. (2008). The roles, responsibilities and characteristics of audit committee in China. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 21(5), 721-751.
- Ling, H. P. and Lee, G. C. (2012). Enhancing corporate governance structure for greater voluntary disclosure: Malaysian evidence. EADN Individual Research Grant Project, 1-24.
- Liu, G. and Sun, J. (2010). Director tenure and independent audit committee effectiveness. *International research journal of finance and economics*, 51, 176- 189.
- Marnburg, E. (2000). The behavioral effects of corporate ethical codes: Empirical finding and discussion. *Business Ethics: A European Review* 9 (3), 200-210.
- McMullen, D. & Raghunathan, K. (1996). Enhancing audit committee effectiveness. *Journal of Accountancy*, 182, 79-81.
- Menon, K. and Williams, J. D. (1994). The use of audit committee for monitoring. *Journal of Accounting and Public Policy*, 13, 121-139.
- Morck, R., Shleifer, A. and Vishny, R. W. (1988). Management ownership and market valuation: An empirical analysis. *Journal of Financial Economics*, 20, 293- 315.
- Muhammad, R., Shahimi, S., Yahya, Y. & Mahzan, N. (2009). Disclosure quality on governance issues in annual reports of Malaysia PLCs. *International business research*, 2 (4), 61-72.
- Myers, R. (2003). Ensuring ethical effectiveness. *Journal of Accountancy* 195, 28-33.
- Othman, R., Ili, F. I., Siti, M. M. A. and Nooraslinda A. A. (2014). Influence of audit committee characteristics on voluntary ethics disclosure.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Ojk.go.id, 1-21.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Ojk.go.id, 1-14.
- Pallant, J. (2001). *The SPSS survival manual: A Step-by-step guide to data analysis using SPSS for Windows (version 10)*. St Leonards, NSW: Allen & Unwin.
- Pater, A. and Gils, A. V. (2003). Stimulating ethical decision-making in a business context: Effects of ethical and professional codes. *European Management Journal*, 21 (6), 762-772.

- Persons, O. S. (2005). Relation between the new corporate governance rules and the likelihood of financial statement fraud. *Review of Accounting and Finance* 4 (2), 125-148.
- Persons, O. S. (2009). Audit committee characteristics and earlier voluntary ethics disclosure among fraud and no-fraud firms. *International Journal of Disclosure and Governance*, 6 (4), 284-297.
- Persons, O. S. (2011). Characteristics and financial performance of no ethics-code firms. *Journal of academic and business ethics*, 1-14.
- Peters, G. F., Abbott, L. J. and Parker, S. (2000). Voluntary disclosures and auditor specialization: The case of commodity derivative disclosures, 1-30.
- Poluan, G. dan Paskah, I. N. (2015). Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* dan Kondisi *Financial Distress* terhadap Luas Pengungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 4 No. 1: 3.
- Preuss, L. (2009). Ethical sourcing codes of large UK-based corporations: prevalence, content, limitations. *Journal of Business Ethics*, 88, 735-747.
- Qu, W., Cooper, J. Wise, V. & Leung, P. (2012). Voluntary disclosure in a changing regulatory environment – evidence from Chinese stock market. *International Journal of Economics and Finance*, 4 (4), 30-43.
- Raghunandan, K., Read, W. J. and Rama, D. V. (2001). Audit committee composition, gray directors and interaction with internal auditing. *Accounting Horizons* (June), 105-118.
- Rahmat M. M., Takiah M. I. and Norman M. S. (2009). *Managerial Auditing Journal*, 24 (7), 624-638.
- Rouf, A. (2011). Corporate characteristics, governance attributes and the extent of voluntary disclosure in Bangladesh. *African Journal of Business Management*, 5 (19), 7836-7845.
- Shivdasani, A., and Yermack, D. (1999). CEO involvement in the selection of new board members: An empirical analysis. *The Journal of Finance* 54, 1829-1853.
- Steiner, I. D. (1972). *Group Process and Productivity*. New York: Academic Press.
- Sullivan, J. D. and Shkolnikov, A. (2006). Business ethics: The essential component of corporate governance. Center for International Private Enterprise, 1-16.
- Schwartz, M. (2001). The nature of the relationship between corporate codes of ethics and behaviour. *Journal of Business Ethics*, 32, 247-262.
- Thoopsamut, W. and Jiakengkit, A. (2009). Audit committee characteristics, audit firm size and quarterly earnings management in Thailand, 8 (1), 3-12.
- Valentine, S. and Barnett, T. (2002). Ethics code and sales professionals' perceptions of their organizations' ethical values. *Journal of Business Ethics*, 40, 191-200.
- Wardani, Puruwita. (2012). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Luas Pengungkapan Sukarela. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14 No. 1: 4.
- Wulandari, Siswi. (2015). Good corporate governance dalam perspektif etika bisnis. *Journal Applied Business and Economics*, 1 No. 3.
- Xie, B., Davidson, W. N. and Dadalt, P. J. (2003). Earnings management and corporate governance: The role of board and the audit committee. *Journal of Corporate Finance*, 9(3), 295-316.
- Yang and Krishnan (2005). Audit committees and quarterly earnings management, *International Journal of Auditing*. 9(3): 201-219.
- Yuen, D. C. Y., Liu, M., Zhang, X. & Lu, C. (2009). A case study of voluntary disclosure by Chinese enterprises. *Asian journal of finance and accounting*, 1 (2), 118-145.